

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SUPERVISI PENGAJARAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh: Sri M ardiyah

(Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri 2 Pangkalpinang)

Abstract

Dewasa ini, kegiatan supervisi masih cenderung berorientasi pada pengawasan terhadap aspek formal-administrasi. Hal ini menjadikan suasana kemitraan antara guru dan supervisor kurang tercipta. Bahkan secara psikologis, guru merasa terbebani dengan pikiran untuk dinilai. Padahal, kegiatan supervisi akan efektif apabila tidak ada perasaan tertekan diganti dengan suasana pemberian pelayanan bersifat informal. Fakta lain yang banyak muncul adalah pelaksanaan supervisi yang seolah ada tapi tiada. Hal inilah yang menjadi dasar penulisan topik ini, khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip supervisi pengajaran dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik guru serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Untuk mengupas permasalahan tersebut, dilakukan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari referensi-referensi teoretis dan hasil-hasil kajian dalam tema yang serupa. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

agar didapatkan gambaran tentang hakikat dan fakta tentang pelaksanaan prinsip-prinsip supervisi di sekolah-sekolah.

Hasil analisis dan interpretasi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip supervisi pengajaran belum diterapkan sepenuhnya serta belum mengarah pada pemberian bantuan dan bimbingan profesional kepada guru-guru agama, terutama untuk mengatasi persoalan pengajaran yang mereka hadapi. Supervisor hanya sesekali melakukan observasi kelas. Begitupun bimbingan individual, diskusi kelompok, dan kegiatan supervisi lainnya, masih sangat minim. Beberapa kendala dalam pelaksanaan supervisi pengajaran tersebut adalah keterbatasan waktu, kemampuan supervisor, motivasi supervisor dan guru yang rendah, serta hambatan psikologis dan struktur.

Kata-kata kunci: Implementasi, Supervisi pengajaran, Prinsip-prinsip supervisi, Kompetensi pedagogik guru.

Abstract

Nowadays, supervision activities still tend to be oriented to the supervision of the formal aspects-administration. It makes the atmosphere of partnership between teachers and supervisors less created. Even psychologically, teachers felt burdened with the thought to be assessed. In fact, supervision activities will be effective when there is no feeling depressed replaced by an atmosphere of service delivery are informal. Another fact that many emerging is the implementation of supervision as nothing but nothing. This is the basis of the writing of this topic, especially on the application of the principles of supervision of teaching in order to improve pedagogical competence of teachers and the factors that affect the implementation.

To explore these issues, conducted a literature study. Data were collected from references theoretical and the results of studies into similar themes. The data are then analyzed Descriptive qualitative in order to obtain an overview of the nature and facts about the implementation of the principles of supervision in schools.

The results of the analysis and interpretation suggests that the principles of supervision of teaching has not been fully implemented and not lead to the

provision of assistance and professional guidance to teachers of religion, especially to overcome the problems of teaching they face. Supervisor only occasionally conduct classroom observations. Likewise individual guidance, group discussions, and supervision activities of other, still very minimal. Some of the obstacles in the implementation of the supervision of the teaching is to time constraints, the ability of the supervisor, motivation supervisors and teachers Low, as well as psychological barriers and structures.

Keywords: Implementation, supervision of teaching, principles of supervision, pedagogic competence of teachers.

Pendahuluan

Dalam manajemen modern, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek-aspek tersebut merupakan kesatuan proses dan prosedur sehingga tidak boleh mengesampingkan salah satunya. Di sinilah peran pengawas dibutuhkan untuk memastikan jalannya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar manajemen modern dan penjaminan mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan.

Untuk itu, seorang pengawas harus kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan dan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007. Dalam Permendiknas ini ditegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki enam kompetensi minimal, yaitu kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sosial.

Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengawas sekolah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Survei yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 terhadap para pengawas di suatu kabupaten menunjukkan bahwa masih banyak pengawas yang lemah dalam kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan (Ngawi, 2011).

Patut disadari, lemahnya kompetensi para pengawas

berdampak pada pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk pembinaan guru, kepala sekolah, dan *stakeholder* lain. Padahal, pembinaan guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran. Melalui pembinaan, pengawas sekaligus dapat memberikan inspirasi dan dorongan kepada guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja. Bagi kepala sekolah, pengawas layaknya mitra tempat berbagi serta konsultan, tempat meminta saran dan pendapat dalam pengelolaan sekolah. Sementara bagi guru, pengawas sekolah selayaknya menjadi "gurunya guru" dalam mengatasi berbagai permasalahan guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Supervisi Pengajaran: Konsepsi dan Aplikasi

Istilah supervisi telah lama dikenal dan dibicarakan dalam dunia pendidikan, terutama di negara-negara maju. Dalam praktiknya, konsep ini diwujudkan dalam bimbingan dan pelayanan

profesional yang berorientasi pada usaha-usaha membantu guru memperbaiki sistem pengajaran. Maka, tidak mengherankan jika supervisi dipandang sebagai suatu pendekatan yang sangat sesuai dalam dunia pendidikan yang demokratis, yang memungkinkan guru-guru meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dengan kemampuan dan kemauan sendiri.

Dalam perkembangannya, terdapat keragaman pendapat dalam menafsirkan istilah supervisi sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda pula dalam praktiknya. Berikut ini diuraikan beberapa pandangan tentang supervisi, yang nantinya menjadi kerangka acuan dalam membahas supervisi pengajaran.

Pertama, konsep supervisi modern yang dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967). Menurutny, supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik (Sutisna:1993, hlm. 264). Supervisi bukanlah inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, melainkan lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih

baik antarguru karena bersifat demokratis.

Selanjutnya, Wiles dan Lovell mengemukakan tujuh macam supervisi, yaitu: pengembangan tujuan; pengembangan program; kontrol dan koordinasi; motivasi; pemecahan masalah; pengembangan profesi; serta evaluasi hasil pendidikan. Situasi belajar yang mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran inilah, menurutnya, seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi (Etek:2003,hlm.25).

Kedua, pernyataan Djam'an Satori bahwa pada mulanya istilah supervisi lebih populer dan telah lama dikenal dalam lingkungan organisasi industri dan perusahaan, baru kemudian dikenal dalam organisasi pendidikan. Menurutny, supervisi mempersoalkan tentang hubungan antara supervisor dengan pekerja/guru (Satori:1995, hlm.11) dalam pelayanan yang berorientasi kepada perbaikan dan pengembangan. Maka, dalam organisasi pendidikan, perhatian supervisi dititikberatkan pada usaha mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan

berbagai faktor yang memengaruhinya, seperti guru, murid, kurikulum, alat dan buku-buku pengajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik.

Untuk itu, supervisi harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, guna mendorong, memotivasi, dan mengarahkan pertumbuhan profesional guru-guru (*Ibid*, hlm.12). Dengan demikian, guru-guru dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan bagi murid-murid yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, Made Pidarta yang mengemukakan bahwa supervisi merupakan merupakan suatu proses pembimbingan yang dilakukan oleh atasan, dalam hal ini kepala sekolah dan pengawas, kepada para guru dan personalia sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan hasil pembelajaran di sekolah (Pidarta:1992, hlm.5).

Keempat, pandangan Ben M. Haris bahwa supervisi adalah: *what school personel do with adults and things to maintain or change the school operation is ways that directly influence the teaching processes employed to promote pupil learning.*

Supervision is highly instruction-related but not highly pupil related. Supervision is a majors function of the school operation, not task or a specific job or a set of techniques. Supervision of instruction is directed toward both main-taining and improving the teaching-learning processes of the school (Etek:2003, hlm.25).

Batasan Harris di atas mengandung pengertian bahwa supervisi memiliki hubungan, fungsi, dan tujuan. Menurutnya, supervisi berhubungan erat dengan kegiatan pengajaran, namun tidak berhubungan langsung dengan murid. supervisi juga memiliki fungsi, yakni untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan hasil yang lebih baik. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengadakan pemeliharaan dan perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran.

Kelima, rumusan senada yang disampaikan oleh Oteng Sutisna dan Ibrahim Bafadal. Sutisna mendefinisikan supervisi sebagai

“satu bentuk pelayanan, bantuan profesional, atau bimbingan bagi guru-guru membangun program latihan dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan guru, dan membantu guru meningkatkan kemampuannya”.(Sutisna: 1993,hlm.264) Sedangkan Bafadal menyebutnya sebagai “Serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses belajar mengajar demi men-capai tujuan pengajaran” (Bafadal:1992, hlm.27).

Keenam, pernyataan Alfonso, dkk, bahwa supervisi pengajaran merupakan perbuatan yang secara langsung mempengaruhi perilaku guru dalam membantu peningkatan kualitas pembelajaran murid dan mencapai tujuan sekolah (... *Behavior officially designated by the organization that directly affects teacher behavior in such a way as to facilitate pupil learning and achieve the goals of the organization.*)(Etek, hlm.27).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan pelayanan sekaligus bimbingan profesional bagi guru-guru berupa segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan,

dorongan, dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Dengan begitu, mereka dapat melaksanakan tugas (mengajar) dengan lebih baik sehingga proses belajar mengajar dan mutu hasil belajar murid meningkat.

Oleh karena hasil belajar murid ini erat kaitannya dengan kemampuan dan keterampilan mengajar guru, maka supervisi pengajaran mesti diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar guru. Untuk itu, penataran, lokakarya, seminar, kunjungan kelas, pertemuan individual, pemberian brosur-brosur, dan kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan profesional guru mesti dilakukan. Dengan meningkatnya kemampuan guru, akan meningkat pula kualitas belajar murid, dan selanjutnya mencapai tujuan sekolah.

Namun demikian, Abd. Kadim Masaong (Masaong, hlm.8). mengingatkan bahwa tujuan supervisi pengajaran akan sulit tercapai apabila dalam pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif/kemitraan, serta konstruktif dan kreatif. *Pertama,*

prinsip ilmiah yang mengandung unsur-unsur: Sistematis yang berarti supervisi harus dilaksanakan secara teratur, berencana, kontinyu; Obyektif, yakni data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi; dan Instrumen atau alat yang digunakan dapat memberikan informasi sebagai umpan-balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. *Kedua*, Demoktaris. Artinya, pelaksanaan supervisi harus menjunjung tinggi asas musyawarah. *Ketiga*, Kooperatif/kemitraan. Dalam pelaksanaan supervisi, seluruh staf dapat bekerja sama untuk mengembangkan usaha dalam "menciptakan" situasi pembelajaran dan suasana kerja yang lebih baik. *Terakhir*, Konstruktif dan kreatif. Supervisor harus membina inisiatif staf/guru serta mendorong mereka untuk aktif menciptakan suasana agar setiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya.

Secara lebih rinci, Rivai (1981) membagi prinsip-prinsip supervisi menjadi dua, yaitu prinsip positif dan prinsip negatif. Prinsip positif mensyaratkan bahwa supervisi harus: (a) konstruktif dan

kreatif; (b) lebih berdasarkan sumber kolektif kelompok daripada usaha-usaha supervisi sendiri; (c) didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi; (e) dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin; (f) dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggota kelompoknya; (g) progresif; (h) didasarkan pada keadaan yang riil dan sebenarnya; (i) sederhana dan informal dalam pelaksanaannya; serta (j) obyektif dan sanggup mengadakan *self evaluation*.

Sedangkan dalam prinsip-prinsip negatif ditegaskan bahwa supervisi tidak boleh: (a) bersifat mendesak/direktif; (b) didasarkan atas kekuasaan pangkat/kedudukan atau atas dasar kekuasaan pribadi; (c) dilepaskan dari tujuan pendidikan dan pengajaran (*the ultimate educative goals*); (d) terlalu banyak mengenai soal-soal yang mendetail mengenai cara-cara mengajar dan bahan pembelajaran; e) mencari-cari kesalahan dan kekurangan staf/guru; serta (f) terlalu cepat mengharap hasil dan lekas kecewa (Bafadol, hlm.27).

Prinsip-prinsip tersebut, positif dan negatif, menjadi acuan utama pengawas agar kontribusi supervisi terhadap pembelajaran membuahkan hasil yang optimal.

Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Sebagaimana disebut dalam Pasal 28 ayat (3) butir (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang dimilikinya.

Secara rinci, dalam *Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG)*, menyebut tujuh aspek Kompetensi Pedagogik, yaitu: (a) mengenal karakteristik peserta didik; (b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; (c) mampu mengembangkan kurikulum; (d) menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik; (e) mengembangkan

potensi peserta didik; (f) melakukan komunikasi dengan peserta didik; serta (g) menilai dan mengevaluasi pembelajaran (Kemendikbu: 2010, hlm.43).

1. Mengetahui karakteristik peserta didik. Dalam aspek ini, guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik secara umum dan khusus untuk membantu proses pembelajaran, baik aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, maupun latar belakang sosial budaya.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Guru mampu: menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif, sesuai dengan standar kompetensi guru; serta menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar.
3. Mampu mengembangkan kurikulum. Guru mampu mengembangkan kurikulum melalui penyusunan silabus yang sesuai dengan tujuan kurikulum;

membuat dan menggunakan RPP yang cocok dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran, serta memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

4. Menciptakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu: menyusun serta melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap; melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik; serta menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran.
5. Mengembangkan potensi peserta didik. Guru dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti

yang jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka.

6. Melakukan komunikasi dengan peserta didik. Guru mampu: berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik serta bersikap antusias dan positif; serta memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik.
7. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Guru mampu: menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan; melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan; serta menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya.

Dengan banyaknya kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, tentu guru tak akan mampu berjalan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Mereka membutuhkan bimbingan, arahan, dan partner yang dapat meningkatkan kemampuan

mereka. Di sinilah peran strategis supervisor dalam membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran.

Implementasi Prinsip-prinsip Supervisi Pengajaran Pendidikan Agama Islam: Antara Idealitas dan Realitas

Penelitian C.E. Beeby mengungkap bahwa penilik (supervisor) “.... Jarang sekali penilik menyediakan waktu khusus mengunjungi kelas-kelas, apalagi untuk sekali-sekali memberikan demonstrasi mengajar”. Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah umumnya hanya bersifat administratif rutin, seperti memungut data statistik dan memeriksa bangunan sekolah yang menghabiskan bagian terbesar dari kunjungannya (Beeby: 1987, hlm.104).

Menurut Semiawan (Imron, 1996), hal tersebut terjadi disebabkan sistem supervisi yang kurang memadai dan sikap mental dari supervisor yang kurang sehat. Kurang memadainya sistem supervisi dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain: (1) supervisi masih menekankan pada aspek administratif dan mengabaikan aspek profesional, (2) tatap muka antara supervisor dan guru-guru

sangat sedikit, (3) supervisor banyak yang sudah lama tidak mengajar, sehingga banyak dibutuhkan bekal tambahan agar dapat mengikuti perkembangan baru, (4) pada umumnya masih menggunakan jalur satu arah dari atas ke bawah, dan (5) potensi guru sebagai pembimbing kurang dimanfaatkan.

Sedangkan sikap mental yang kurang sehat dari supervisor terlihat dari beberapa indikasi berikut: (1) hubungan profesional yang kaku dan kurang akrab akibat sikap otoriter dari supervisor sehingga guru takut bersifat terbuka kepada supervisor; (2) banyak supervisor dan guru merasa sudah berpengalaman, sehingga merasa tidak perlu lagi belajar; serta (3) supervisor dan guru merasa cepat puas dengan hasil belajar siswa.

Maka tidak mengherankan ketika penelitian Masaong (2012) menyimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi belum efektif meningkatkan kemampuan profesional guru dalam pembelajaran. Menurutnya, tingkat pengetahuan pengawas tentang konsep-konsep supervisi pembelajaran modern harus ditingkatkan agar sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas dan Kualifikasi Akademik.

Hasil survey Direktorat Tenaga Kependidikan pada Tahun 2008 menunjukkan bahwa salah satu kelemahan para pengawas terletak pada kompetensi supervisi akademik. Hal ini diperkuat oleh ungkapan beberapa pengawas dan guru-guru Pendidikan Agama Islam pada SMP di Pangkalpinang, yang menyatakan bahwa masih banyak pengawas yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam aspek penelitian dan pengembangan serta supervisi manajerial. Menurut mereka, pemahaman pengawas terhadap standar kompetensi masih sangat kurang dan disinyalir terkait dengan mekanisme rekrutmen pengawas di era otonomi daerah yang belum mengacu pada standar kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi tersebut. Jadi, wajar ketika guru-guru mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang mereka hadapi.

Secara umum, supervisor baru menjalankan tugas sebatas

kunjungan ke sekolah sesuai dengan jadwal. Mereka belum menyentuh aspek-aspek substansial pembinaan kegiatan pengajaran guru, seperti perencanaan pengajaran, metode mengajar, dan evaluasi pengajaran. Maka, tidak mengherankan pula ketika persepsi guru-guru mengenai kesupervisian yang dilakukan oleh supervisor menjadi negatif karena terkesan seperti inspeksi. Padahal, pelaksanaan supervisi pengajaran sangat penting untuk membantu guru-guru meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mengajarnya.

Dalam pelaksanaannya, supervisor terlebih dahulu harus merancang program dan jadwal supervisi yang meliputi kegiatan inventarisasi masalah yang dihadapi guru, pertemuan khusus, memberikan contoh mengajar yang baik, bimbingan evaluasi dan memberikan solusi pemecahan masalah pengajaran guru. Sayangnya, program dan jadwal kunjungan tersebut seringkali tidak disosialisasikan pada pihak-pihak terkait sehingga pihak penanggung jawab mengalami kesulitan untuk memantau kegiatan tersebut. Selain itu, program dan jadwal

yang dibuat belum representatif dan produktif untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan bimbingan kepada guru dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab supervisor dalam pelaksanaan fungsi dan peran mereka masih rendah. Padahal, program pembinaan profesi guru merupakan inti dari supervisi pengajaran yang melekat pada fungsi dan peranan supervisor.

Dalam hal teknik supervisi, supervisor baru menerapkan teknik kunjungan kelas yang pelaksanaannya pun masih sangat minimal. Teknik lain yang meliputi bimbingan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan kunjungan antara kelas belum diterapkan. Sayangnya, teknik kunjungan kelas yang pun belum berjalan sebagaimana mestinya dengan alasan kendala-kendala berikut: (a) keterbatasan waktu, (b) keterbatasan kemampuan, dan (c) rendahnya motivasi kerja. Akibatnya, supervisor tidak mengetahui suasana kelas dan proses belajar mengajar secara komprehensif sehingga tidak

mendapatkan data indentifikasi masalah pengajaran yang valid dan mendasar untuk perbaikan proses belajar mengajar selanjutnya.

Selanjutnya, dalam konteks pola pendekatan supervisi pengajaran, sepertinya supervisor dan guru belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pendekatan. Padahal, kejelasan penggunaan pendekatan dalam supervisi sangat penting agar terjalin hubungan yang akrab antara supervisor dengan guru-guru sehingga guru-guru terhindar dari rasa takut, terancam, dan keterpaksaan. Dari ungkapan supervisor dan guru-guru, nampak adanya perbedaan pandangan. Guru-guru menyebutkan pendekatan yang digunakan supervisor adalah direktif, sedangkan supervisor sendiri menyatakan bahwa pendekatan yang digunakannya adalah nondirektif. Supervisor beranggapan demikian karena ia belum mengamati secara khusus masalah-masalah pengajaran guru serta belum melibatkan diri secara penuh untuk mengarahkan, membimbing, dan menjelaskan secara langsung masalah-masalah

tersebut.

Persoalan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman para pengawas terhadap hakekat supervisi yang menurut Neagley dan Evans adalah melayani dan membantu guru mengembangkan pembelajaran dan kurikulum. Sayangnya, para pengawas masih terpaku dengan nama jabatannya sebagai pengawas, yang bertugas mengawasi guru dengan melakukan banyak koreksi atau mencari kesalahan. Sementara tugas pengawas untuk melayani dan membantu guru yang merasa kesulitan dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya cenderung terabaikan. Pengawas seperti ini masih “*enjoy*” dengan pola lama tersebut, padahal tidak semua guru melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Tugas pengawaslah untuk memberikan dorongan dan penguatan agar guru dapat memperbaiki kesalahan dan terus berkembang, jika perlu, mereka diberikan kesempatan melakukan supervisi sesama guru (supervisi kolegial atau supervisi kesejawatan).

Faktor lain yang menjadi masalah adalah keteraturan dan kesinambungan supervisi. Sudah

menjadi rahasia umum bahwa tingkat kehadiran supervisor di sekolah binaannya rendah. Meskipun dihadapkan dengan keterbatasan waktu, pengawas tetap memiliki tanggung jawab untuk membina guru di sekolah tersebut. Artinya, pengawas harus selalu hadir di sekolah binaan sesuai dan tidak akan berpindah sebelum tugasnya rampung dan optimal.

Bisa jadi, rendahnya keaktifan supervisor tersebut diakibatkan latar belakang supervisor yang nonguru atau berasal dari bidang keilmuan nonpendidikan dan keguruan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat membaca, minimnya kesempatan dan keinginan untuk pengembangan diri, serta persoalan teknis lain yang cenderung menghambat kreativitas dan inovasi. Realitas ini kian menambah borok dunia pendidikan akibat tidak berbobotnya kualitas pelaku-pelaku pendidikan yang pada gilirannya membias pada kualitas pendidikan.

Sebagai tenaga profesional, guru telah terdidik dan terlatih dengan baik sehingga memiliki kemampuan dan keahlian profesional dalam bidang pendidikan dan keguruan. Dengan

demikian, guru menguasai landasan-landasan kependidikan dan kompetensi untuk menjalankan tugasnya sebagai pengajar, pembimbing, ataupun administrator (Sudjana:1011, hlm.19-20).

Meski demikian, guru harus tetap memiliki motivasi untuk menjalankan profesinya dengan baik, tanpa harus menunggu bantuan dan layanan dari pengawas. Untuk itu, guru mutlak memiliki kepribadian dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kualitas kompetensinya. Sebagaimana dinyatakan Djamarah, seorang guru yang memiliki kepribadian merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pendidik melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang senantiasa meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didiknya (Djamarah:2008, hlm.56).

Kesimpulan

Hingga saat ini, supervisi pengajaran masih dianggap sebagai permasalahan yang sepele. Maka tidak heran ketika prinsip-prinsip supervisi tidak dipahami dan diterapkan secara serius. Akibat langsung yang muncul adalah kesulitan para

guru mencapai perkembangan optimal dalam hal profesi keguruan. Hal ini memunculkan efek domino bagi kualitas proses belajar mengajar sampai kualitas pendidikan secara umum.

Yang patut dikhawatirkan adalah keengganan untuk mengubah pola pikir dan pemahaman tentang tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan supervisi. Jika supervisi masih dipahami sebagai rutinitas formal belaka, maka harapan adanya peningkatan kualitas pendidikan bak “jauh panggang dari api”. Demikian halnya ketika masing-masing pihak mengabaikan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan supervisi, maka para peserta didik dan dunia pendidikan akan menjadi korban.

Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk bekerja bersama-sama dalam melaksanakan supervisi pendidikan dan pengajaran secara benar dan baik, sesuai dengan hakikat dan prinsip-prinsip dasarnya. Melalui kerja keras dan kerja cerdas parapihak setidaknya menunjukkan upaya serius sebagai

tahapan awal mencapai tujuan pendidikan nasional. Semoga.

Referensi

- Bafadal, Ibrahim. 1992. *Supervisi Pengajaran, Teori dan Aplikasinya dalam Membina Profesi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beeby, C.E. 1987. *Pendidikan di Indonesia*. (terj. BP3K dan YIIS). Jakarta: LP3ES. cet. ke-3.
- Djamarah, S.B. 2008. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Etek, Yurnalis. 2003. "Supervisi Pengajaran di Madrasah Tsanawiyah: Studi Deskriptif Analitik di Bandar Lampung Tahun 2001–2002", *Disertasi Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Masaong, Abd. Kadim. 2013. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru: Memberdayakan Pengawas sebagai Gurunya Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa, E. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pidarta, Made. 1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori, Djam'an. 1995. *Efektifitas Sistem Supervisi Sekolah dalam Rangka Pembinaan Profesional Guru*. Bandung: IKIP.
- Sudjana, N. 2011. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sutisna, Oteng. 1993. *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa. cet. ke-10

